

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berbeda dengan negara-negara tetangganya dalam kawasan Timur Tengah, Yordania seringkali tidak mendapatkan sorotan yang besar, hal ini dikarenakan mereka menjadi satu-satunya negara yang tidak ikut mengalami kejadian *Arab Spring*¹ pada tahun 2011 dan tetap mengalami stabilisasi secara politis. Selain itu, Yordania diapit oleh berbagai negara berkonflik seperti Irak, Israel, dan Suriah, serta tidak kaya akan sumber daya alam baik itu minyak seperti kebanyakan negara di Timur Tengah ataupun air. Dalam dinamika kawasan itu sendiri, Yordania tidak pernah mengalami konflik yang serius dengan negara lain. Ia bahkan menjadi salah satu diantara dua negara yang berani menandatangani sebuah perjanjian perdamaian dengan Israel. Ia juga menjadi salah satu anggota pelopor dari *Organization of Islamic Cooperation*² dan *Arab League*³ (Mediterranean Affairs, 2014).

¹*Arab Spring* merupakan serangkaian protes anti-pemerintah dan pemberontakan pro-demokrasi yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara, termasuk Tunisia, Libya, Suriah, dan Mesir dimulai pada musim semi 2011 untuk melawan rezim-rezim otoriter (Blakemore, 2019).

²*Organization of Islamic Cooperation* adalah organisasi *inter-governmental* terbesar kedua setelah PBB dengan keanggotaan 57 negara yang tersebar di empat benua. Organisasi ini bertujuan berusaha untuk melindungi kepentingan dunia Muslim dengan mempromosikan perdamaian internasional (OIC, 2019).

³ *Arab League* adalah organisasi regional multi-nasional dari negara berbahasa Arab di benua Afrika dan Asia untuk mempromosikan pertumbuhan perdagangan dan ekonomi serta kedaulatan dan stabilitas politik di wilayah tersebut (Kenton, 2019).

Gambar 1.1. Peta Lokasi Yordania



(Sumber: Britannica Encyclopedia)

Akibat posisi tersebut, konstelasi perpolitikan negara-negara disekitarnya menjadi krusial bagi survivalitas Yordania. Maka pada 5 Juni 2017, saat Bahrain, Uni Emirat Arab (selanjutnya UAE), Mesir, serta Arab Saudi resmi mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan negara Qatar dan menanggukuhkan pasukan Qatar yang ikut serta dalam koalisi pimpinan Saudi di Yaman, kejadian itu secara langsung mempengaruhi Yordania. Yordania semakin terperangkap dalam peperangan diplomatik tersebut saat Arab Saudi dan UAE meminta negara lain untuk mengikuti perilaku mereka sebagai bentuk solidaritas (Chuqhtai, 2018). Tuntutan yang kemudian disampaikan oleh Kerajaan Arab Saudi dengan aliansinya berjumlah 13, yang secara umum memerintahkan Qatar untuk, membatasi hubungan diplomatik dengan Iran; mengakhiri kehadiran militer Turki di Qatar; memutuskan seluruh ikatan dan pendanaan untuk organisasi atau kelompok “teroris”, yang disebutkan secara spesifik yaitu Ikhwanul Muslimin, Al Qaeda, *Islamic States*, dan Hizbullah Lebanon; menutup stasiun media Al-Jazeera maupun portal berita lainnya yang didanai Qatar; mengakhiri intervensi dalam

urusan domestik negara lainnya dengan menghentikan kontak dengan oposisi politik di Arab Saudi, UAE, Mesir dan Bahrain, serta membayar reparasi dan kompensasi untuk kerugian finansial yang disebabkan oleh kebijakan Qatar. Demi mematuhi seluruh tuntutan tersebut, Qatar akan dipantau audit keuangannya untuk 10 tahun, dan harus menyetujui seluruh tuntutan tersebut dalam 10 hari atau daftar tersebut akan dibatalkan (Wintour, 2017).

Menjelang dua hari setelah tuntutan tersebut dipublikasi, pada 7 Juni 2019 Yordania ikut mengumumkan keputusan mereka untuk mengurangi hubungan diplomatik dengan Qatar melalui penarikan diplomat dari masing-masing negara dan mencabut lisensi saluran satelit Al-Jazeera yang berada di Amman, sesuai pernyataan yang dikeluarkan oleh menteri negara untuk urusan media dan juru bicara pemerintah Mohammad Momani.

“studying the causes of the crisis witnessed in the ties between Egypt, Saudi Arabia, the UAE and Bahrain and Qatar, the government has decided to reduce diplomatic representation with the State of Qatar and revoke the licence of Al Jazeera channel’s office in the Kingdom”

Momani menjelaskan lebih lanjut bahwa keputusan itu dilakukan demi kepentingan negaranya dan kawasan Teluk.

“Achieving regional stability and security, consensus among Arabs over policies that are prone to end the crises of the region and collective efforts to protect the national state and building a secure and bright future for our peoples will always remain priorities that the Kingdom will do its utmost to realize”.

Meskipun perilaku tersebut mendapat banyak kecaman dari publik akibat hubungan menguntungkan yang selama ini dimiliki oleh kedua belah pihak, Raja Abdullah II tetap melanjutkan keputusan tersebut (Jordan Times, 2017). Hal ini dikarenakan Yordania sangat dependen dengan Arab Saudi untuk bantuan ekonomi dan energi. Arab Saudi menjadi penopang finansial bagi Yordania setelah perekonomian Yordania mulai terpuruk akibat meningkatnya pengungsi yang pada mulanya hanya berasal dari Palestina namun semakin bertambah akibat

Perang Sipil Suriah. Ini diiringi dengan utang publik yang mencapai 94 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara mereka dan pengangguran yang tinggi di angka 18,5 persen. Selain itu, adanya tekanan dari *International Monetary Fund* (IMF) yang memberi pinjaman bernilai US\$723 juta ke kerajaan Yordania, membuat Perdana Menteri Yordania Hani Mulki terpaksa menyusun langkah-langkah penghematan yang drastis pada bulan Mei 2018. Hal ini memicu protes publik yang cukup besar dengan menuntut pemerintah untuk membatalkan rencana untuk menaikkan pajak penghasilan dan memotong subsidi untuk listrik, bahan bakar, dan makanan (Agence France-Presse, 2018). Maka ketergantungan pemerintah pada bantuan asing sangat tinggi. Respons kerajaan yang hanya sebatas mengurangi relasi dianggap oleh koalisi sebagai sebuah tindakan pembangkangan dan dispekulasi oleh para pejabat Yordania menjadi alasan utama Arab Saudi menolak untuk memperbarui bantuannya pada 2017. Hal ini kemudian memiliki dampak yang cukup besar pada kemampuan Yordania mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapinya (Furlow dan Borgognone, 2018).

Pemutusan hubungan yang diajukan Arab Saudi dan koalisinya seharusnya hanya berlangsung selama enam bulan. Sekitar 60 persen dari perdagangan Qatar mengalami transit melalui pelabuhan UAE dan perbatasan Saudi, sehingga isolasi yang dilakukan mereka diharapkan dapat menciptakan disrupsi fatal pada keberlangsungan Qatar. Namun sikap Qatar yang mengacuhkan permintaan mereka memperpanjang krisis diplomatik tersebut sehingga mencapai tahun ketiganya pada 2019 tanpa adanya perkembangan. Situasi ini diperburuk oleh keputusan Qatar untuk normalisasi dengan Iran dan semakin mempererat kerjasama dengan Turki. Meski begitu, Arab Saudi beserta negara lainnya tetap kukuh dan masih menutup perbatasan negara mereka, memotong semua rute udara, laut, dan darat, serta menghentikan kerjasama politik maupun ekonomi dengan Qatar (Habibi, 2019).

Namun memasuki bulan Juli 2019, salah satu negara menyatakan keinginannya untuk menciptakan kembali hubungan diplomatik dengan Qatar setelah dua tahun menarik duta besar mereka dari negara tersebut, yaitu Yordania. Hal ini menjadi

berita mengejutkan pasalnya Arab Saudi, UAE, Bahrain, dan Mesir masih tidak menunjukkan tanda akan mundur dari sanksi-sanksi yang telah diberikan kepada Qatar. Meski begitu, Yordania tetap menetapkan seorang duta besar yaitu Zeid al-Lawzi, seorang Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri untuk ditempatkan di Doha. Sebaliknya pemerintah Qatar juga mengirimkan delegasinya, Saud bin Nasser bin Jassem al Thani, anggota dari keluarga kerajaan ke ibu kota Yordania, Amman (Salama, 2019). Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dilihat adanya suatu hal yang menarik untuk diteliti yaitu alasan Yordania untuk memulihkan hubungan diplomatik dengan Qatar. Hal ini merupakan sebuah anomali mengingat bahwa persetujuan Qatar dengan empat negara tersebut yang memutuskan hubungan diplomatik dengannya masih berlanjut, dan dalam jangka panjang dapat berpengaruh secara signifikan pada perekonomian Yordania yang mengalami ketergantungan dengan Arab Saudi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, pertanyaan penelitian yang diambil oleh penulis ialah: Mengapa Yordania memutuskan untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Qatar, meskipun sebelumnya Yordania telah melakukan pemutusan dengan Qatar mengikuti Arab Saudi beserta koalisinya?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi identitas nasional dan keamanan kawasan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri dengan memberikan analisis terkait normalisasi hubungan diplomatik Yordania dengan Qatar secara komprehensif. Berdasarkan fakta yang telah diuraikan di latar belakang masalah, terdapat indikasi bahwa dalam krisis diplomatik Qatar 2017 yang diinisiasi Arab Saudi dengan koalisinya, Yordania secara jelas mengambil pihak dengan bergabung pada koalisi tersebut. Akan tetapi pada 2019 Yordania memutuskan untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Qatar, walaupun krisis tersebut belum selesai.

1.4. Kerangka Pemikiran

Terdapat setidaknya tiga kerangka yang dapat menjelaskan mengapa Yordania memutuskan untuk normalisasi hubungan diplomatik mereka dengan Qatar. Kerangka pertama menjelaskan bagaimana identitas nasional sebagai salah satu faktor internal, dapat mempengaruhi suatu negara saat membuat kebijakan luar negeri. Kerangka kedua kemudian menjelaskan bahwa lingkungan eksternalnya juga ikut mempengaruhi, dalam hal ini peneliti menggunakan *regional security complex theory* untuk menganalisa dinamika kawasan Timur Tengah. Kerangka ketiga, lalu menjelaskan bagaimana keamanan kawasan memiliki korelasi dengan pertumbuhan ekonomi.

1.4.1. *Level of Analysis* Identitas Nasional

Menurut Valerie Hudson (2007: 117) dalam merumuskan sebuah kebijakan luar negeri, suatu negara akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya merupakan identitas nasional. Secara lebih spesifik, Alexander Wendt (1992: 394) menjelaskan kepentingan dari identitas nasional dalam hubungan internasional melalui teori konstruktivisme. Wendt menekankan dalam teori tersebut bahwa perilaku sebuah negara tidak hanya dibentuk oleh struktur namun agensi ikut berperan. Maka konstruktivisme pun menekankan bahwa fenomena dan stigma-stigma yang ada di dunia tidak bersifat *nature* dan *given* namun merupakan sebuah bentuk konstruksi pemikiran artifisial yang dibuat oleh seluruh aktor yang terlibat (Weber, 2005: 61). Penelitian ini kemudian menekankan pada *aspirational constructivism* yang dikemukakan oleh Anne Clunan. Teori ini menitikberatkan adanya korelasi antara bagaimana identitas nasional dibentuk dan pengaruhnya dalam mengkonstruksi pandangan kepentingan nasional yang kemudian dipromosikan oleh para elit politik. Salah satu proposisi inti dari *aspirational constructivism* adalah bagaimana memori historis dan aspirasi yang terbentuk olehnya merupakan determinan krusial dalam menerima sebuah identitas sebagai *self-defining* negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa agensi berperan signifikan didalamnya (Clunan, 2005: 24).

Memori historis sendiri menjadi krusial untuk mengetahui apa yang kemudian dipahami negara tersebut sebagai kekuatan, status, dan prestise yang melekat pada identitas-identitas yang dimilikinya. Hal ini karena pengalaman masa lalu dapat menjadi standar utama untuk mengetahui aspirasi yang dimiliki suatu negara dan jika diterima atau ditolak untuk selanjutnya digunakan (Clunan, 2005: 24). Selanjutnya, identitas nasional merupakan salah satu tipe identitas kolektif yang merupakan seperangkat ide yang diterima secara umum oleh sekelompok aktor tertentu dan mendefinisikan mereka. Unsur-unsur dari identitas kolektif tersebut kemudian dikatakan merupakan *givens* dari suatu komunitas politik karena ide didalamnya terdiri dari perbatasan negara yang membedakan grup tersebut dengan yang diluar, serta prinsip, nilai-nilai, dan simbol yang dipengaruhi oleh para politisi, representatif media, dan masyarakat secara kontinu. Oleh karena itu, elit politik akan berulang kali menginterpretasi kembali identitas negara tersebut menilik pada pengalaman lampau dan kejadian yang baru sehingga identitas tidak statis (Clunan, 2009: 28).

Jika kemudian salah satu *self-image* berhasil mendominasi diskursus politik, citra tersebut diinstitutionalisasi dalam hukum dan regulasi domestik, struktur pemerintahan, maupun sebagai obligasi dan norma perilaku dalam relasi dengan negara lainnya. Saat mayoritas dari elit politik menyetujui adanya kesinambungan antara *self-image* tersebut dengan aspirasi sejarah dan realitas negara, maka ia dapat mendefinisikan kepentingan nasional (Clunan, 2009: 29). Bagi sebuah negara, identitas dan kepentingan nasionalnya bertumpu pada dua pilar, yaitu tujuan politik dan status internasional. Tujuan politik meliputi fitur internal dan kepercayaan tentang sistem pemerintahan ekonomi dan politik yang sesuai buat negara, sedangkan status internasional terdiri dari posisi negara dalam hierarki internasional kekuatan baik itu politik, militer, dan sosial (Clunan, 2009: 31). *Aspirational constructivism* berasumsi bahwa elit politik kemudian akan membentuk sebuah orientasi behavioral terhadap tindakan kooperasi, kompetisi, maupun konfrontasi dengan sebuah negara berdasarkan konteks *self-image*, yang juga terdiri dari konstruksi *ingroup* dan *outgroup* (Clunan, 2009: 47).

1.4.2. *Regional Security Complex Theory*

Dalam bukunya yang berjudul “Global Politics of Regionalism”, Louis Fawcett menjelaskan bahwa dalam memahami region dan regionalisme, perlu adanya definisi yang multilevel dan serbaguna. Berdasarkan penjabarannya, pengertian region sendiri perlu ditarik keluar dari definisi teritorialnya – yaitu sekumpulan unit yang dikelompokkan secara geografis – dan mengembangkannya lagi untuk menginkorporasi kesamaan, interaksi, dan kerjasama didalamnya. Maka region dapat dilihat sebagai sekumpulan unit atau ‘zona’ yang bersifat dinamis dan memiliki kepentingan yang identik dalam beberapa sektor, seperti ekonomi, militer, sosial, dan politik. Pemahaman terhadap region kemudian dapat mengalir ke konsep regionalisme, saat negara-negara kemudian membuat kebijakan untuk bekerjasama dan mengkoordinasikan sebuah strategi untuk kawasan yang biasanya dikonsolidasikan melalui sebuah organisasi (Fawcett, 2005: 24). Paska Perang Dingin, sebuah resurgensi terhadap regionalisme muncul, akibat proses dekolonisasi yang menghadirkan banyak negara berdaulat baru. Salah satu sektor yang kemudian menjadi agenda dalam regionalisme merupakan keamanan. Buzan menyatakan bahwa sebuah *security complex* dapat hadir saat sekelompok negara memiliki permasalahan keamanan primer yang terikat sedemikian dekat sehingga keamanan nasional mereka tidak dapat dipisahkan dari satu sama lain (Buzan dan Waever, 2003: 41). Hal ini kemudian dapat menciptakan sebuah keamanan kawasan. Maka konsep *regional security complex* muncul dan definisi RSC kemudian dapat dikembangkan lebih lanjut dari pengertian *region* sebelumnya, menjadi memiliki arti sebagai ‘seperangkat unit yang mana proses sekuritisasi, desekuritisasi, ataupun keduanya sangat terikat sehingga permasalahan keamanan mereka tidak dapat dianalisa maupun diselesaikan secara terpisah antara satu sama lain (Buzan dan Waever, 2003: 44).

Dalam menganalisa sebuah kawasan keamanan, Buzan mencetuskan *Regional Security Complex Theory* (selanjutnya RSCT), Buzan mengungkapkan bahwa RSCT menyediakan sebuah pandangan yang lebih komprehensif daripada pendekatan simplistik seperti unipolaritas atau hubungan antara *core-periphery*.

Hal ini dikarenakan faktor-faktor lokal mendapatkan peran dalam analisis keamanan (Buzan dan Waever, 2003: 40). Suatu karakter dari suatu RSC seringkali akan terbentuk karena dipengaruhi oleh faktor-faktor historis seperti adanya permusuhan yang lama (Arab dengan Persia) atau akibat sebuah keterikatan budaya yang merangkul suatu wilayah peradaban (Buzan dan Waever, 2003: 45). Untuk menganalisa dinamika suatu kawasan, Buzan menjelaskan bahwa terdapat empat variabel yang menyusun struktur inti dari sebuah RSC. Pertama adalah kondisi geografis, yang membedakan kompleksitas antara tiap kawasan, contohnya di Asia sendiri yang dapat dibagi menjadi tiga *regional security complex* berbeda, yaitu di Asia Tenggara, Asia Selatan, maupun Asia Timur dan memiliki kasus-kasus tersendiri. Kedua adalah pandangan Buzan bahwa *regional security complex* merupakan replikasi dari struktur anarki dalam tingkatan lokal, dimana adanya koeksistensi dari dua atau lebih unit otonom yang masing-masing memiliki kepentingan sendiri. Ketiga merupakan *polarity* yang menjelaskan distribusi kekuatan antar tiap unit dan bagaimana ini membentuk arah kebijakan dari negara-negara di kawasan tersebut. Terakhir adalah konstruksi sosial yang menggambarkan pola *amity* (persahabatan) dan *enmity* (permusuhan) diantara negara-negara dalam kawasan. Pola ini dapat dicerminkan melalui tindakan dan interpretasi para negara saat memilih untuk melakukan aliansi maupun perlawanan dalam satu regional (Buzan dan Waever, 2003: 53).

Lebih lanjut, untuk memahami bagaimana suatu kawasan keamanan bekerja dalam mempengaruhi suatu negara, terdapat beberapa level analisis yang saling memiliki korelasi dan membentuk sebuah *security constellation*. Pertama, secara domestik, perlu diketahui apa vulnerabilitas yang dimiliki secara internal oleh negara tersebut, karena ini dapat mendefinisikan bentuk ancaman dalam perspektif mereka. Kedua, adalah relasi antara negara dengan negara yang menciptakan regionalisasi tersebut. Ketiga, merupakan interaksi kawasan dengan kawasan lainnya. Analisa ini hanya dilakukan secara terbatas karena RSCT memang fokus kepada interaksi secara internal. Namun tingkat ini dapat menjadi signifikan jika terdapat suatu asimetri dengan region lain yang memiliki *global power*, sehingga dapat terjadi hubungan *interregional* yang timpang. Ini

dicontohkan dengan Amerika Utara dengan Amerika Selatan. Terakhir adalah peran dari *global power* dalam suatu kawasan yang menghubungkan antara struktur keamanan global dan regional (Buzan dan Waever, 2003: 51). Penting untuk memahami bahwa dalam RSCT, *subcomplexes* juga bisa hadir sebagai ‘tingkatan-setengah’ dari suatu region. Maksud dari hal tersebut adalah *subcomplexes* pada dasarnya memiliki definisi yang sama dengan RSC namun merupakan sebuah turunan yang hanya merepresentasikan salah satu kelompok di dalam lingkup luasnya RSC. Representasi dari konsep ini digambarkan di Timur Tengah, dengan relasi antara *Gulf* (Teluk) dan *Levant* (Syam) yang memiliki pola-pola *disting* dalam interdependensi keamanan mereka, namun saling mempengaruhi dan tumpang tindih sehingga erat hubungannya (Buzan dan Waever, 2003: 52).

1.4.3. Pengaruh Keamanan Kawasan pada Pertumbuhan Ekonomi

Terdapat banyak literatur yang telah membahas adanya keterkaitan kuat antara ketidakstabilan kondisi politik suatu negara dengan performa pertumbuhan ekonomi secara domestik. Akan tetapi masih ada perdebatan tentang kausalitas diantara keduanya karena seringkali banyak kejadian politik eksternal juga mempengaruhi keadaan suatu negara. Maka Alberto Ades dan Hak B. Chua dalam artikelnya “Thy Neighbor’s Curse: Regional Instability and Economic Growth” menjelaskan korelasi antar keduanya dengan menunjukkan bagaimana besarnya eksternalitas negatif akan meningkat secara linear dengan ketidakstabilan politik domestik.

Lebih lanjutnya, Ades dan Chua mengemukakan bahwa terdapat dua kondisi saat ketidakstabilan kawasan akan berdampak pada pertumbuhan suatu ekonomi negara. Pertama merupakan kemampuan ketidakstabilan kawasan untuk mendisrupsi arus perdagangan. Seringkali ketidakstabilan politik di negara tetangga dapat berakibat pada ditutupnya rute perdagangan eksternal atau dihancurkan jaringan transportasi, terutama saat pemerintah kehilangan kontrol dan terdapat kelompok-kelompok milisi yang mengambil alih. Disrupsi seperti ini berdampak lebih besar bagi negara yang *landlocked* dan memiliki ketergantungan

tinggi pada rute transit di negara lain. Tanpa adanya akses ke pasar internasional, perkembangan ekonomi akan menurun secara drastis dan efeknya dapat meluas ke sektor lainnya, seperti ketersediaan pangan (Ades dan Chua, 1997: 289). Kedua, ketidakstabilan kawasan dapat menyebabkan peningkatan pengeluaran biaya militer. Krisis kawasan seringkali secara paksa mengharuskan negara untuk mengalihkan sumber daya untuk pertahanan dan keamanan perbatasan sebagai upaya pencegahan agar perang tidak menyebar dan untuk menghindari arus pengungsi akibat perang sipil (Ades dan Chua, 1997: 293). Pernyataan Ades dan Chua kemudian didukung oleh Chauvet et al. (2007: 10) yang menjelaskan bahwa menjadi tetangga langsung dengan *failing state*⁴ akan mengurangi pertumbuhan perekonomiannya. Chauvet menjelaskan bahwa dalam dunia yang saling terkoneksi, sebuah bencana ekonomi atau sosial di suatu negara akan *spillover* ke negara tetangganya. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mempengaruhi tetangganya dan jika negara tersebut mengalami peperangan, berdasarkan penelitiannya Chauvet, negara tetangga akan mengalami tingkat pertumbuhan yang lebih rendah sebesar 0,6 persen.

Literatur Easterly dan Levine (1997: 120), juga menyatakan relasi antara pertumbuhan suatu negara dan pertumbuhan di negara tetangga menciptakan sebuah *contagion*⁵ sistematis. Beberapa saluran yang memungkinkan terjadinya *contagion* pertumbuhan atau kebijakan dalam suatu kawasan, merupakan saat kebijakan suatu negara disalin oleh tetangga lain jika dianggap efektif, baik itu positif maupun negatif seperti mengadopsi kebijakan yang lebih otoriter di Timur Tengah atau kebijakan investasi menggunakan utang di Amerika Latin. Kedua adalah kesinambungan *foreign direct investment* di tiap negara, semisal kemudian satu negara mengalami peperangan, FDI dapat ditarik dari kawasan tersebut secara keseluruhan (Easterly dan Levine, 1997: 134). Selain itu, saat sebuah negara mengalami kesulitan ekonomi hal ini dapat tumpah ke tetangganya

⁴ Dalam bahan Chauvet, sebuah *failing state* dikatakan suatu negara yang gagal dalam tiga hal, yaitu (1) menyakiti penduduk di negara tetangga, (2) gagal menyediakan keamanan bagi warganya sendiri, dan kemudian (3) gagal mengurangi kemiskinan dalam negaranya juga. Hal ini dapat berupa negara yang memiliki pemerintahan dan kebijakan yang lemah, atau mengalami perang saudara.

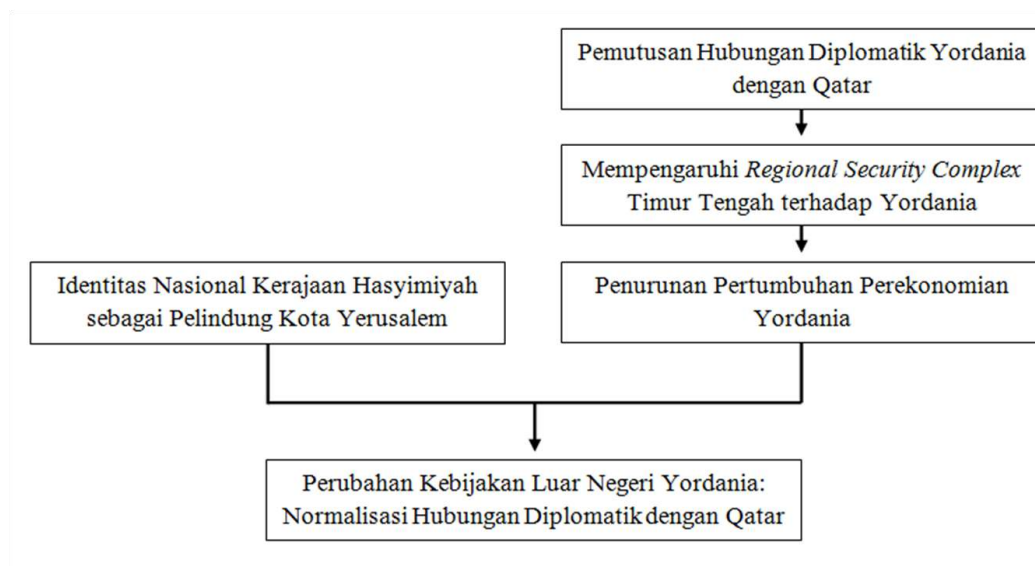
⁵*Contagion* merupakan istilah untuk menjelaskan fenomena menular.

dengan mengurangi kesempatan untuk emigrasi tenaga kerja dan pendapatan, atau negara dengan infrastruktur yang hancur akibat perang mempersulit perdagangan. Konsentrasi negara gagal yang mengalami peperangan atau memiliki perekonomian rendah dapat menghadirkan sebuah efek *multiplier*⁶ yang memperlambat perekonomian di kawasan tersebut (Easterly dan Levine, 1997: 136).

1.5. Skema Kerangka Pemikiran

Pengaruh identitas nasional serta keamanan kawasan Timur Tengah yang mempengaruhi stabilitas perekonomian Yordania mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Yordania untuk normalisasi hubungan diplomatik dengan Qatar.

Grafik 1.1. Skema Proses Normalisasi Hubungan Diplomatik Yordania dengan Qatar



Sumber: Analisis Peneliti

1.6. Argumentasi

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis berargumentasi bahwa alasan Yordania normalisasi hubungan diplomatik dengan Qatar adalah sebagai berikut:

⁶Efek *multiplier* dapat dilihat sebagai indikator tingkat komplementar antara dua variabel yang saling berinteraksi (Burke, 2016)

1. Pengaruh keamanan kawasan terhadap penurunan pertumbuhan perekonomian Yordania dengan terhambatnya arus perdagangan, peningkatan biaya belanja militer, serta isu pengungsi, meningkatkan urgensi Yordania untuk mencari bantuan ekonomi.
2. Identitas nasional Yordania sebagai pelindung dari kota Yerusalem menyebabkan Yordania melakukan aliansi dengan negara yang mengakui status tersebut.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Definisi dan Operasionalisasi Konsep

1.7.1.1. Normalisasi Hubungan Diplomatik

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019), normalisasi didefinisikan sebagai tindakan mengembalikan pada keadaan, hubungan, dan sebagainya yang biasa atau yang normal. Sedangkan menurut Cambridge Dictionary (2019), hubungan diplomatik diartikan sebagai pengaturan antara dua negara dimana masing-masing memiliki perwakilan di negara lain. Dalam penelitian ini, Yordania melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Qatar, yang ditandai dengan dibukanya kembali kantor kedutaan besar di masing-masing ibukota dan penugasan diplomat ke tiap negara. Selain itu, normalisasi ini dikuatkan dengan meningkatkan kerjasama di bidang-bidang seperti militer dan ekonomi.

1.7.1.2. Pelindung Peninggalan-peninggalan Sejarah

Kehadiran sebuah sistem perlindungan untuk menjaga bangunan atau situs yang secara kultural sangat signifikan untuk sebuah komunitas telah lama dilaksanakan, khususnya di Afrika dan Timur Tengah sebelum masa – masa kolonialisme. Adanya pelindung pada mulanya hanya bertujuan untuk melindungi nilai-nilai yang tertanam dan kualitas dari peninggalan sejarah tersebut, namun hal ini ikut terpolitisasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan seringkali menjadi pusat dari persengkataan (Jopela, 2011: 107). Sebuah pelindung sendiri dapat berupa kelompok atau negara

tertentu yang secara historis mempunyai hak atas peninggalan tersebut atau telah merebutnya dari kepemilikan sebelumnya, seperti halnya keluarga Saud yang merebut peran pelindung Mekkah dan Madinah dari Yordania. Peran ini dinamakan "خادم الحرمين الشريفين" (*Khadim al-Haramain asy-Syarifain, Penjaga Dua Kota Suci*), yang mana خادم diartikan sebagai pelindung tanah suci Mekkah dan Madinah. Gelar tersebut yang juga didapatkan oleh Yordania untuk Yerusalem. Pelindung ini kemudian memiliki tanggung jawab utama untuk mengorganisasi pemakaian dan perlindungan situs-situsnya, beberapa tugas diantaranya merupakan koordinasi aktivitas pemeliharaan yang seringkali dilakukan oleh sebuah dewan khusus yang memantau kebutuhan keamanan untuk menjaga situs dari potensi serangan, serta memfasilitasi pertukaran informasi bagi warga disekitar dengan pengunjung. Namun legitimasi utama dari pelindung seringkali berupa kemampuannya untuk terus mengembangkan sebuah situs melalui renovasi (Najem et al., 2017: 231).

1.7.1.3. Indikator Penurunan Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa indikator yang menunjukkan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat dilihat dari beberapa pola yang secara keseluruhan diukur dari keuangan publik, kondisi ekonomi, iklim ekonomi, maupun diversifikasi ekonomi. Jika dirincikan lebih pola-pola tersebut dapat dijabarkan ke pendapatan per kapita. PDB, tingkat pengangguran, inflasi, produktivitas, utang negara, tingkat kemiskinan, atau kegagalan bisnis. Ini juga memperhitungkan jika ada penurunan dalam harga komoditas, pendapatan perdagangan, investasi asing, maupun devaluasi mata uang nasional. Selain itu indikasi lainnya adalah eksistensi dari kesulitan sosial ekstrim yang dihadapi oleh masyarakat akibat adanya program penghematan ekonomi maupun ketidaksetaraan kelompok yang semakin meningkat (The Fund for Peace, 2018).

1.7.2. Tipe Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif dengan menggunakan pertanyaan ‘mengapa’ untuk mencari hubungan antara dua variabel yang tersedia (Silalahi, 2009: 32). Penelitian eksplanatif bertujuan untuk menerangkan dan menemukan kausalitas antara variabel-variabel dependen dengan independen untuk memahami penyebab suatu fenomena, sehingga bisa membuktikan hipotesis yang telah diajukan. Dalam konteks ini, penelitian ini berusaha untuk mengetahui alasan Yordania melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Qatar setelah dua tahun.

1.7.3. Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dari tahun 2011, yaitu pada saat *Arab Spring* berlangsung dan membawa perubahan masif terhadap tatanan regional dan keamanan kompleks Timur Tengah hingga tahun 2019 ketika pemerintah Yordania memutuskan untuk merestorasi hubungan dengan Qatar. Meskipun demikian, peneliti tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan data diluar jangkauan penelitian apabila relevan untuk mendukung penelitian.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan memperoleh data dari sumber primer dan sumber sekunder. Penulis mencari data primer melalui pernyataan dalam pidato maupun dokumen pemerintah yang dipublikasikan secara resmi oleh pemerintah Yordania. Sumber data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari pihak pertama. Sumber-sumber data sekunder dapat berupa jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, berita *online* yang dapat digunakan peneliti untuk menganalisa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini (Bhattacharjee, 2012).

1.7.5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk menjawab rumusan masalah. Peneliti memilih metode ini karena dianggap dapat digunakan

untuk memahami fenomena yang sedang terjadi dan menekankan kepada interpretasi peneliti berdasarkan analisis data-data yang telah diterima. Melalui metode ini, peneliti akan mencoba menemukan kaitan diantara variabel sehingga dapat mengetahui hubungan diantara mereka dan menciptakan sebuah penjelasan.

1.7.6. Sistematika Penelitian

Laporan penelitian yang berjudul, “Faktor Normalisasi Hubungan Diplomatik Yordania dengan Qatar: Analisis Dinamika Keamanan Kawasan dan Identitas Nasional” terbagi ke dalam lima bab dengan sistematika berikut, bab pertama akan menjelaskan mengapa penelitian ini diambil dengan mengacu pada latar belakang permasalahan yang dibuat serta rumusan masalah, yang kemudian akan dijawab melalui kerangka pemikiran yang menghasilkan hipotesis. Bab dua lalu menjelaskan dinamika keamanan kawasan Timur Tengah dan pengaruh transformasi didalamnya terhadap agenda keamanan Yordania selanjutnya. Bab tiga kemudian menjabarkan korelasi antara keamanan kawasan tersebut dengan pertumbuhan ekonomi Yordania. Selanjutnya bab empat melakukan analisis terhadap identitas nasional Yordania terkait Yerusalem sebagai faktor pendorong Yordania melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Qatar. Terakhir, bab lima berisi kesimpulan penelitian dengan menjelaskan temuan penting penelitian yang kemudian dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.